



LAPORAN TAHUNAN

EVALUASI KERJA DAN KINERJA BAPPEDA LITBANG BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025



**BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Dalam rangka memenuhi tugas tersebut, serta sebagai upaya melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, maka disusun Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Bappeda Litbang tahun 2025, guna menggambarkan target dan capaian pada Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Manna, 05 Januari 2026
Kepala BAPPEDA LITBANG
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Ajhaahary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Gambaran Umum	
1.1.2 Maksud dan Tujuan	
1.2. Kesekretaiatan dan Kepegawaian	2
1.2.1 Peralatan/Perlengkapan	
1.2.2 Kepegawaian	
BAB II PROGRAM KERJA	
2.1. Visi dan Misi	11
2.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.3. Program dan Kegiatan	12
2.4. Isu Strategis	14
2.5. Target Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
BAB III ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA	
3.1 Anggaran	16
3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja	16
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025	
4.1 Sekretariat	20
4.1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4.1.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
4.1.3 Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah	
4.2 Bidang P2EPD	22
4.2.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	
4.2.2 Sub Bidang Data dan Informasi	
4.2.3 Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	
4.3 Bidang PPM	25
4.3.1 Sub Bidang PPM 1	
4.3.2 Sub Bidang PPM 2	

4.3.3 Sub Bidang PPM 3	
4.4 Bidang PSI	27
4.4.1 Sub Bidang Perekonomian	
4.4.2 Sub Bidang Sumber Daya Alam	
4.4.3 Sub Bidang Infrastruktur	
4.5 Bidang Litbang	33
4.5.1 Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	
4.5.2 Sub Bagian Bidang Ekonomi Pembangunan	
4.5.3 Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	
4.5.4 Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual	
BAB V CAPAIAN KERJA DAN KINERJA	
5.1 Capaian Kerja	35
5.2 Capaian Kinerja	47
5.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	52
BAB VI PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH	
6.1 Permasalahan	53
6.2 Upaya Pemecahan Masalah	53
BAB VII PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Kepala Badan Bappeda Litbang	3
Tabel 1. 2	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Sekretaris Bappeda Litbang.....	3
Tabel 1. 3	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Aula Bappeda Litbang.....	3
Tabel 1. 4	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Sekretariat Bappeda Litbang.....	4
Tabel 1. 5	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Bappeda Litbang.....	4
Tabel 1. 6	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang P2EPD Bappeda Litbang.....	5
Tabel 1. 7	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang PPM Bappeda Litbang.....	5
Tabel 1. 8	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang LITBANG Bappeda Litbang.....	6
Tabel 1. 9	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Gudang Sekretariat Bappeda Litbang	6
Tabel 1. 10	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Kasubag keuangan Bappeda Litbang	6
Tabel 1. 11	Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Gudang Aula Bappeda Bappeda Litbang	7
Tabel 1. 12	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Litbang.....	8
Tabel 1. 13	Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	9
Tabel 1. 14	Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	9
Tabel 1. 15	Komposisi Pegawai Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	10
Tabel 2. 1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	15
Tabel 3. 1	Pagu Anggaran Pada Bappeda Litbang Tahun 2024.....	16
Tabel 3. 2	Realisasi Belanja Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024	16
Tabel 5. 1	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian)	35
Tabel 5. 2	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan)	37
Tabel 5. 3	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Barang Milik Daerah)	38
Tabel 5. 4	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan)	39
Tabel 5. 5	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi)	39

Tabel 5. 6	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan)	40
Tabel 5. 7	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kasubid Ppm I)	40
Tabel 5. 8	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Ppm II)	41
Tabel 5. 9	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Ppm III)	41
Tabel 5. 10	Indikator Kinerja Utama Eselon IV Sub Bidang Perekonomian	42
Tabel 5. 11	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam)	43
Tabel 5. 12	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Infrastruktur).....	44
Tabel 5. 13	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan).....	44
Tabel 5. 14	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Ekonomi Dan Pembangunan)	45
Tabel 5. 15	Indikator Kinerja Utama Eselon IV (Kepala Sub Bidang Inovasi Dan Teknologi)	46
Tabel 5. 16	Indikator Kinerja Utama Eselon III (Sekretaris Bappeda Litbang)....	47
Tabel 5. 17	Indikator Kinerja Utama Eselon III (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Daerah).....	47
Tabel 5. 18	Indikator Kinerja Utama Eselon III (Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia)	48
Tabel 5. 19	Indikator Kinerja Utama Eselon III (Kepala Bidang Perekonomian, Sda Dan Infrastruktur)	49
Tabel 5. 20	Indikator Kinerja Utama Eselon III (Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan)	49
Tabel 5. 21	Indikator Kinerja Utama Eselon II (Kepala Perangkat Daerah)	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Konsultasi Publik.....	22
Gambar 4. 2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	23
Gambar 4. 3. Fasilitasi RKPD Kabupaten / Kota Tahun 2026	23
Gambar 4. 4. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029	23
Gambar 4. 5. Pendampingan SIPD	24
Gambar 4. 6. Rapat Forum Satu Data	24
Gambar 4. 7. Asersi Stunting Tahun 2025.....	25
Gambar 4. 8. Review Kinerja Stunting Tahun 2025.....	25
Gambar 4. 9. Verifikasi Renstra	26
Gambar 4. 10. Rapat Stunting dan Penyerahan Penghargaan	26
Gambar 4. 11. Verifikasi Renstra OPD Mitra	26
Gambar 4. 12. Verifikasi RKA Pergeseran Mitra PPM	27
Gambar 4. 13. Evaluasi Pelaksanaan Keg. Pembangunan Tk. Kelurahan	27
Gambar 4. 14. Rapat Evaluasi Rapat Tw 3 dana Kelurahan 2025.....	28
Gambar 4. 15. Verifikasi Renstra OPD Mitra	28
Gambar 4. 11. Verifikasi RKA Pergeseran 2025 Mitra PSI.....	29
Gambar 4. 12. Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	29
Gambar 4. 18. Verifikasi Renstra OPD Mitra PSI	30
Gambar 4. 19. Rapat Perencanaan Kawasan Perdesaan.....	30
Gambar 4. 20. Rapat Terkait Kawasan Perdesaan Food Estate	31
Gambar 4. 21. Survey Kawasan Prioritas Pedesaan Kecamatan Kedurang	31
Gambar 4. 22. Sosialisasi Pelaksanaan Studi EHRA.....	32
Gambar 4. 23. Zoom Verifikasi Usulan Kegiatan Inpres 2 Tahun 2025	32
Gambar 4. 24. Verifikasi DPA Perubahan OPD Mitra	32
Gambar 4. 25. Verifikasi Renstra OPD Mitra	33
Gambar 4. 26. Rapat IPKD	33
Gambar 4. 27. Konsultasi dan Koordinasi Inovasi.....	34
Gambar 4. 28. Rapat Pembahasan HAKI	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Gambaran Umum

Dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, diperlukan penilaian dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu kunci. Hal ini selaras dengan tujuan perbaikan dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan dilakukan pada setiap akhir triwulan bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang ada di lingkungan Bappeda Litbang kabupaten Bengkulu Selatan. Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Bappeda Litbang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan, Kepala Bidang, Kasubid dan Kasubag (Pejabat Struktural yang memiliki Perjanjian Kinerja) selama kurun waktu 1 Tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang. Selain itu, Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Bappeda Litbang. Identifikasi potensi, keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam

Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik. Adapun maksud dan tujuan laporan adalah :

Maksud Laporan :

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda Litbang
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda Litbang.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan Laporan :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda Litbang kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda Litbang.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda Litbang.

1.2 Kesekretariatan dan Kepegawaian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan Sumber Daya yang cukup. Sumber Daya tersebut terdiri dari Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sumber Daya Sarana Prasarana penunjang kegiatan.

1.2.1 Peralatan/Perlengkapan

Kondisi sarana dan prasarana Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1. 1.

Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Kepala Badan
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Mobil Mini Bus (Innova Zenix)	1 unit
2	Kursi Rapat/Putar	16 unit
3	Kursi Tamu	1 unit
4	AC Unit	3 unit
5	Meja Rapat	1 unit
6	Lemari Es	1 unit
7	Televisi	2 unit
8	Telepon Mobile	1 unit

Tabel 1. 2

Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Sekretaris
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Mobil Mini Bus (Mitsubishi Expander)	1 unit
2	Lemari Kayu	1 unit
3	Kursi Rapat/Tamu/Kerja	4 unit
4	Meja Biro	1 unit
5	AC	1 unit
6	Televisi	1 unit
7	Stabilizer	1 unit

Tabel 1. 3

Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang Aula
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Kursi Besi/Metal	7 unit
2	Kursi Rapat	16 unit
3	Kursi Putar	2 unit
4	Kursi Kerja Pejabat	3 unit
5	Moubeleur Lainnya	2 unit
6	Gordyin/Kray	43 unit
7	Moubeleur Lainnya	2 unit
8	Peralatan Studio Lainnya	1 unit
9	Printer	1 unit

Tabel 1. 4
Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruangannya Sekretariat
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Sepeda Motor	3 unit
2	Meja Kerja Kayu	2 unit
3	Kursi Tamu	1 unit
4	Tripod	1 unit
5	Lemari Kayu	1 unit
6	Lemari Kaca	4 unit
7	Alat Penghancur Kertas	1 unit
8	Batttery Drone	2 unit
9	Kursi Besi/Rapat/Putar	4 unit
10	Meja ½ Biro	1 unit
11	AC Sentral/Unit	2 unit
12	Loudspeaker (Baretone/Aktive 15 Inc)	1 unit
13	Laptop	6 unit
14	Microphone (Rode NT USB)	1 unit
15	Gordyin/Krey	1 unit
16	Monitor	1 unit
17	Printer	4 unit
18	Proyektor + Attachment	2 unit
19	Unintemuptible Power Suply (UPS)	1 unit
20	Facsimile	1 unit
21	Unit Transceiver VHF Portable	1 unit
22	Unit Transceiver VHF Transportable	3 unit
23	Unit Pemancar VHF/FM	1 unit
24	Unit Pemancar VHF/FM Transportable	3 unit
25	Video Camera dan Recorder	1 unit

Tabel 1. 5
Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruangannya Perekonomian,
SDA dan Infrastruktur Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Mobil Mini Bus (Avanza)	1 unit
2	Sepeda Motor (Honda)	2 unit
3	Meja Kerja Kayu	1 unit
4	Kursi Rapat/Putar	2 unit
5	Meja ½ Biro	2 unit
6	AC Unit	2 unit
7	PC Unit	1 unit
8	Laptop	6 unit
9	Printer	1 unit

Tabel 1. 6

Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang P2EPD
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Mobil Mini Bus (Toyota Avanza)	1 unit
2	Motor (Honda dan Yamaha)	2 uni
3	Lemari Kayu	4 unit
4	Rak Besi	1 unit
5	Alat Penghancur Kertas	1 unit
6	Meja ½ Biro	6 unit
7	Kursi Rapat	9 unit
8	AC Unit	4 unit
9	Televisi	1 unit
10	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1 unit
11	Automatic Voltage Regulator (AVR)	1 unit
12	PC Unit	3 unit
13	Laptop/Notebook	10 unit
14	Personal Komputer Lain-lain	1 unit
15	Hard Disk	2 unit
16	Monitor	4 unit
17	Printer	1 unit
18	Peralatan personal komputer lainnya	5 unit
19	Server	1 unit

Tabel 1. 7

Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruang PPM Bappeda
Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Mobil Mini Bus (Avanza)	1 unit
2	Lemari Kaca/Kayu	2 unit
3	Meja Kayu	1 unit
4	Meja ½ Biro	7 unit
5	Kursi Rapat/Putar	9 unit
6	AC Unit	4 unit
7	Televisi	1 unit
8	PC Unit	1 unit
9	Laptop	6 unit
10	Printer	1 unit

Tabel 1. 8
Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruangannya LITBANG
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Mobil Mini Bus (Avanza)	1 unit
2	Meja Kerja Kayu	1 unit
3	Meja ½ Biro	2 unit
4	Air Conditioning Unit	1 unit
5	Lemari Kayu	1 unit
6	Kursi Rapat	2 unit
7	AC Unit	1 unit
8	Laptop	5 unit
9	Printer	1 unit

Tabel 1. 9
Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Gudang Sekretariat
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Lori (Artco)	1 unit
2	Global Positioning System	2 unit
3	Scanner	1 unit
4	Mesin Ketik Manual Portable	2 unit
5	Loudspeaker	2 unit
6	Laptop/Notebook	21 unit
7	Personal Komputer Lain	1 unit
8	Hard Disk	2 unit
9	Printer	2 unit
10	Router/Wireless	1 unit
11	Proyektor	6 unit
12	Microphone/Wireless Micc	1 unit
13	Camera Film	2 unit
14	Lensa Kamera	3 unit
15	Stabilizer	1 unit

Tabel 1. 10
Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Ruangannya Kasubag
keuangan Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Sepeda Motor (Honda 2 dan Yamaha)	3 unit
2	Mesin Penghitung Uang	1 unit
3	Lemari Kayu	1 unit
4	Alat Penghancur Kertas	1 unit
5	Kursi Rapat/Putar	9 unit
6	Meja ½ Biro	5 unit
7	AC Sentral/Unit	4 unit

8	Laptop	9 unit
9	Printer	1 Unit

Tabel 1. 11
Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Gudang Aula Bappeda
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Air Conditioning Unit	5 unit
2	Kursi Putar	4 unit
3	Kursi Besi/Metal	7 unit
4	Kursi Rapat	16 unit
5	Moubiler Lainnya	2 unit
6	AC	5 unit
7	Loudspeaker	2 unit
8	Gordyin/Kray	43 unit
9	Kursi Kerja Pejabat	36 unit
10	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1 unit
11	Printer	1unit

Tabel 1. 12
Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Musollah
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Air Conditioning Unit	1 unit
2	Karpet	1 unit

Tabel 1. 13
Daftar Inventarisasi Pengadaan Peralatan, Sarana dan Perlengkapan di Arsip Bappeda
Bappeda Litbang

No.	Uraian	Volume
1	2	3
1	Selo (kotak Penyimpanan) dengan pengatur temperatur	3 unit

1.2.2 Kepegawaian

Jumlah pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sampai 30 September 2025, tercatat sebanyak 69 (tujuh puluh tiga) orang, dengan rincian : 48 (empat puluh delapan = ASN) dan 21 (dua puluh satu = NON ASN).

Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1. 12
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Litbang

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (ORANG)							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	0	2	1	7	3	0	13
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	0	0	6	3	0	9
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0	1	0	6	2	0	9
4	Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	0	0	0	0	7	3	0	10
5	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	5	2	0	7
Total		0	0	3	1	31	13	0	48
Persentase		0	0	6,26	2,08	64,58	27,08	0	100

Berdasarkan Tabel 1.12 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah D3 dan tertinggi adalah Strata satu (S1), sebagian besar berpendidikan S1 yaitu 64,58%.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi Pegawai di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1. 13
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
berdasarkan jenis kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI- LAKI	PEREMP UAN	
1	Sekretariat	4	8	12
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7	2	9
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	5	9
4	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	3	6	9
5	Penelitian dan Pengembangan	1	6	7
Total (Orang)		19	29	48
Persentase		39.58	60.42	100

Berdasarkan Tabel 1.13 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. 14
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	2	9	2	13
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	7	2	9
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	1	8	0	9
4	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	0	0	9	1	10
5	Penelitian dan Pengembangan	0	0	5	2	7
Total		0	2	34	7	48
Persentase		0	4,65	79,07	16,28	100

d. Pegawai Non ASN

Secara lengkap komposisi pegawai Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. 15
Komposisi Pegawai Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

Nomor	Tugas	Jumlah
1	Operator Komputer	14
2	Sopir	1
3	Penjaga Malam	1
4	Petugas Kebersihan	4
5	Pantry	0
	Jumlah	20 orang

BAB II PROGRAM KERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode Tahun 2021-2024 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Visi tersebut adalah :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI MENUJU BENGKULU SELATAN
EMAS BERLANDASKAN CINTA BS”***

Penjelasan Visi :

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing;**
- 2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;**
- 3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi;**

Berkaitan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Bappeda Litbang sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda Litbang lebih dititikberatkan pada pencapaian misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi"**

2.2 Tujuan dan Sasaran

Berikut ini tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan :

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja;
2. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan;

Sasaran :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
2. Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah;

2.3 Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I. PERENCANAAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

II. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

2.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari analisis terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu :

1. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh dan terpadu
2. Belum optimalnya analisis usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara *output* dan *outcome* yang dihasilkan.
3. Belum optimalnya hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

2.5 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda Litbang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator	Baseline 2023	Target Kinerja			Data Capaian pada Tahun akhir Perencanaan
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan	82,92	85,00	90,00	92,00	
	Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	77,25%	80,00%	85,00%	90,00%	
		Persentase Kualitas Perencanaan	83,10%	85,00%	87,00%	90,00%	
		Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	100%	100%	100%	100%	
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	Persentase Nilai Kematangan Inovasi Daerah	67,64%	70,00%	72,00%	75,00%	
	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kapasitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	51,45	60,01	65,01	70,01	

BAB III

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

3.1 Anggaran

Sesuai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 8.912.914.360,- yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi	Rp.8.912.914.360,-
- Belanja Pegawai	Rp.5.110.708.720,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.3.559.033.760,-
2. Belanja Modal	Rp. 243.171.880,-

3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Dari sisi Akuntabilitas Kinerja Program dan Kegiatan, pada tahun anggaran 2025, Bappeda Litbang melaksanakan 4 Program dan 18 Kegiatan 43 Sub. Kegiatan. Pencapaian realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Pagu Anggaran pada Bappeda Litbang Tahun 2025

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
a. Total Belanja :	8.912.914.360,-	8.534.220.516,-	95.75
b. Belanja Operasi	8.912.914.360,-	8.534.220.516,-	95.75
1. Belanja Pegawai	5.110.708.720,-	4.862.022.665,-	95.13
2. Belanja Barang dan Jasa	3.559.033.760,-	3.433.490.851,-	96.47
c. Belanja Modal	243.171.880,-	238.707.000,-	98.97

Jumlah dana perkegiatan dan realisasi pelaksanaan kegiatan APBD Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Dana Kegiatan			Output (keluaran)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.034.161.560,-	4.678.085.688,-	66.51	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.800.000,-	79.906.445,-	98.92	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.500.000,-	38.084.322,-	98.92	Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra, RKA/DPA SKPD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.300.000,-	41.822.123,-	98.87	Lakip, LPPD, Lap. Triwulan dan Lap Tahunan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.493.091.720,-	5.231.243.859,-	95.23	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.110.708.720,-	4.862.022.665,-	95.13	Dokumen laporan keuangan, Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	370.280.000,-	357.280.000,-	96.49	Dokumen laporan keuangan, Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.103.000,-	11.941.194,-	98.66	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.253.000,-	10.102.281,-	98.53	
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.253.000,-	10.102.281,-	98.53	Dokumen BMD SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.435.000,-	52.560.771,-	82.86	
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.080.000,-	20.917.771,-	99.23	Dokumen administrasi kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	42.355.000,-	10.712.000,-	74.71	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.262.000,-	507.425.963,-	98.48	
1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.615.000,-	13.111.055,-	96.30	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.146.000,-	56.165.250,-	93.38	Peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.481.000,-	91.535.220,-	96.88	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya makanan dan minuman
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,-	26.694.979,-	98.87	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.750.000,-	65.650.000,-	99.85	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.270.000,-	254.269.459,-	100	Dalam Daerah, Luar Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang bUrusan Pemerintah Daerah	253.136.680,-	250.335.995,-	98.89	
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.136.680,-	250.335.995,-	98.89	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.301.160,-	165.852.172,-	90.48	
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.301.160,-	165.852.172,-	90.48	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.882.000,-	387.936.248,-	89.20	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	297.643.000,-	253.610.248,-	85.21	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	86.319.000,-	85.176.000,-	98.68	Terpeliharannya gedung kantor dan bangunan lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.920.000,-	49.150.000,-	96.52	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	601.488.000,-	595.180.235,-	98.95	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	322.554.000,-	319.829.181,-	99.16	
1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	66.000.000,-	65.258.958,-	98.88	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	256.554.000,-	254.570.223,-	99.23	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	94.500.000,-	93.279.445,-	98.71	
1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	94.500.000,-	93.279.445,-	98.71	Update data dan informasi pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96.434.000,-	95.604.342,-	99.14	
1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	44.145.000,-	43.660.085,-	98.90	Meningkatkan pencapaian kinerja program/kegiatan pemerintah daerah
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52.289.000,-	51.944.257,-	99.34	Peningkatan kualitas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah	88.000.000,-	86.467.267,-	98.26	
1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	88.000.000,-	86.467.267,-	98.26	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	996.955.400,-	977.896.965,-	98.09	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	377.083.200,-	364.080.641,-	95.79	
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	72.078.000,-	69.041.782,-	95.79	Tersedianya Dokumen Aksi Stunting
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	42.533.000,-	41.852.960,-	98.40	Tersedianya laporan Hasil Evaluasi PAMSIMAS
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	46.804.000,-	45.975.192,-	98.23	Terlaksananya advokasi indikator SDG's
4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	47.152.000,-	46.636.032,-	98.91	Jumlah OPD yang di asistensi
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.441.000,-	76.203.774,-	92.43	Terlaksananya operasional tim TKPKD dan oprasional tim corporate social responsibility (CSR)
6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	86.075.200,-	84.370.901,-	98.02	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosbud
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	266.305.200,-	261.473.387,-	98.19	
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.295.200,-	68.487.698,-	98.83	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	16.095.000,-	15927.604,-	98.96	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/ RPJMD Bidang Perekonomian

3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	102.451.000,-	101.303.548,-	98.92	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Laporan gas rumah kaca (GRK), Dokumen RAD pangan dan Gizi, Laporan GRK Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.909.000,-	19.417.815,-	97.53	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	58.555.000,-	56.296.722,-	96.14	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA
Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	353.567.000,-	352.342.937,-	99.65	
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	184.908.000,-	184.816.045,-	99.95	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.154.000,-	14.043.800,-	99.22	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	154.505.000,-	153.483.092,-	99.34	Laporan pokja PKP, Peningkatan fasilitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	280.309.400,-	275.779.582,-	98.38	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	59.193.000,-	57.995.006,-	97.38	
1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	59.193.000,-	57.995.006,-	97.98	Laporan analisis indeks daya saing daerah dan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	63.564.000,-	62.748.248,-	98.72	
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	63.564.000,-	62.748.248,-	98.72	Berkembangnya varietas unggul lokal kabupaten Bengkulu Selatan
Pengembangan inovasi dan Teknologi	157.552.400,-	155.036.328,-	98.40	
1. Penelitian, Pemhembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	88.632.600,-	88.270.828,-	99.59	Dokumen sistem inovasi daerah, Input indeks daerah, Lomba inovasi IPTEK
2. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	68.919.800,-	66.765.500,-	96.87	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

4.1. Sekretariat

4.1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pelaksanaan Kegiatan pada sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Mengidentifikasi dan menyediakan Kebutuhan Rutin Kantor
2. Memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Pengadaan Barang Milik Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Gedung serta Sarana dan Prasarana)
8. Mengelola dan Mengamankan Barang Milik Daerah (Gedung Aula serta Sarana dan Prasarana)
9. Berkoordinasi dan menyusun DUK ASN
10. Berkoordinasi dan menyusun ANJAB
11. Mengakomodir pengusulan kenaikan pangkat dan berkala ASN
12. Mengakomodir pembuatan SKP (Penilaian Kinerja) ASN
13. Menelaah Kebutuhan Diklat peningkatan kompetensi ASN

4.1.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan (RKT, PK, Rencana Aksi, dan Dokumen IKI)
2. Berkoordinasi dan menyusun Dokumen RKA Pergeseran
3. Berkoordinasi dan menyusun Dokumen DPA Pergeseran
4. Berkoordinasi dan menyusun laporan kinerja (Triwulan 1 Tahun 2025 dan Laporan Triwulan 4/Laporan Tahunan Tahun 2024)
5. Berkoordinasi dan menyusun LKj Tahun 2024.
6. Berkoordinasi dan menyusun Laporan Pengelolaan Risiko
7. Berkoordinasi dan menyusun Laporan Monev Kinerja

8. Berkoordinasi dan menyusun Renja Perubahan Tahun 2025
9. Berkoordinasi dan Menyusun Laporan Monev Kinerja Triwulan 2
10. Berkoordinasi dan Menyusun Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan 2
11. Berkoordinasi dan menyusun Renja Tahun 2026
12. Berkoordinasi dan Menyusun RKA Perubahan 2025
13. Berkoordinasi dan Menyusun DPA Perubahan 2025
14. Berkoordinasi dan Menyusun rancangan Renstra Tahun 2025-2029
15. Berkoordinasi dan Menyusun Laporan Triwulan 3 Tahun 2025
16. Berkoordinasi dan Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2025
17. Berkoordinasi Pengentrian RKA Tahapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026
18. Berkoordinasi dan Menyusun Laporan Triwulan 4 Tahun 2025
19. Berkoordinasi dan menyusun laporan monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025
20. Berkoordinasi dan Menyusun Dokumen Gender Analisis Pathway (GAP)
21. Berkoordinasi dan Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2026
22. Berkoordinasi dan Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Tahun 2025-2029
23. Berkoordinasi dan Menyusun Laporan Pengelolaan Risiko Semester ke-2 Tahun 2025
24. Berkoordinasi dan Menyusun Lkj Tahun 2025
25. Berkoordinasi dan Menyusun Laporan Tahunan Tahun 2025
26. Berkoordinasi dan Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026
27. Berkoordinasi dan Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

4.1.3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah :

1. Pengujian/Verifikasi Daftar Gaji dan Tunjangan ASN
2. Membayarkan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Pengujian/Verifikasi Belanja Rutin Kantor dan Kegiatan
4. Membayarkan Belanja Rutin Kantor dan Kegiatan

5. Menyiapkan regulasi administrasi pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan
7. Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan Pemeriksaan.
8. Berkoordinasi dan Menyusun Laporan Keuangan (Bulanan/Triwulanan/akhir Tahun)
9. Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
10. Mengawasi dan mengendalikan Barang Milik Daerah

4.2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

4.2.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

1. Penyusunan Rencana Koordinasi dan Sinkronisasi
2. Pembahasan Rencana Koordinasi dan Sinkronisasi
3. Berkoordinasi, Penelaahan Permasalahan isu strategis Pembangunan Daerah
4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
5. Pelaksanaan Konsultasi Publik



Gambar 4. 1. Konsultasi Publik

6. Koordinasi dan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

7. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten



Gambar 4. 2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

8. Fasilitasi RKPD Kabupaten / Kota Tahun 2026



Gambar 4. 3. Fasilitasi RKPD Kabupaten / Kota Tahun 2026

9. Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029



Gambar 4. 4. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029

4.2.2. Sub Bidang Data dan Informasi

1. Penyusunan Rencana Koordinasi dan Singkronisasi
2. Pembahasan Rencana Koordinasi dan Sinkronisasi
3. Pendampingan SPID untuk penginputan Renja dan Perubahan Renstra OPD
4. Pendampingan SIPD kepada Perangkat Desa untuk penginputan usulan Desa



Gambar 4. 5. Pendampingan SIPD

5. Pendampingan Penginputan Pokir Anggota Dewan
6. Gelar Rapat Forum Satu Data Bengkulu Selatan



Gambar 4. 6. Rapat Forum Satu Data

4.2.3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Penyusunan Rencana Koordinasi dan Koordinasi
2. Pembahasan Rencana Koordinasi dan Sinkronisasi
3. Laporan Triwulan I
4. Berkoordinasi dan penyusunan Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Dokumen Rencana Kegiatan DAK fisik

4.3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

4.3.1. Sub Bidang PPM1

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
2. Verifikasi RKA/DPA Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pendampingan Rapat Forum KLA, PUG dan Persiapan Rapat Forum Germas.
4. Pengisian form analisa situasi pada beberapa OPD pengampu stunting.
5. Rapat Diskusi Penganggaran Kemiskinan dan Stunting Bersama OPD Terkait
6. Acara FGD Terkait Pohon Faktor Penurunan Prevalensi Stunting Bersama OPD Terkait
7. Asersi Stunting Tahun 2025



Gambar 4. 7. Asersi Stunting Tahun 2025

8. Fasilitasi Bappeda Litbang dalam rangka Koordinasi antara Inspektorat dan Tim TPPS terkait Review Kinerja Stunting Tahun 2025



Gambar 4. 8. Review Kinerja Stunting Tahun 2025

9. Verifikasi Renstra



Gambar 4. 9. Verifikasi Renstra

10. Rapat Stunting dan Penyerahan Penghargaan dari Provinsi



Gambar 4. 10. Rapat Stunting dan Penyerahan Penghargaan

4.3.2. Sub Bidang PPM2

1. Koordinasi kegiatan OPD Mitra
2. Mengasistensi Dokumen Perencanaan OPD Mitra
3. Verifikasi RKA, DPA, RKAP dan DPAP Perangkat Daerah Mitra
4. Berkoordinasi dalam rangka penyusunan Laporan RAD HAM B.04
5. Mengikuti Sosialisasi RAD SDG's Propinsi Bengkulu.
6. Verifikasi Renstra OPD Mitra



Gambar 4. 11. Verifikasi Renstra OPD Mitra

4.3.3. Sub Bidang PPM3

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
2. Verifikasi RKA/DPA Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Penyaluran Dana CSR untuk Keluarga Miskin.
4. Rapat Teknis Verifikasi dan Validasi Data P3KE untuk Penerima Bantuan Pangan Beras
5. Tersusunnya Rencana Aksi Tahunan (RAT) P3KE
6. Tersalurnya data P3KE keseluruhan desa di kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Verifikasi RKA Pergeseran 2025



Gambar 4. 12. Verifikasi RKA Pergeseran Mitra PPM

8. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Tingkat Kelurahan



Gambar 4. 13. Evaluasi Pelaksanaan Keg. Pembangunan Tk. Kelurahan

9. Rapat Evaluasi laporan Triwulan III Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025



Gambar 4. 14. Rapat Evaluasi Rapat Tw 3 dana Kelurahan 2025

10. Verifikasi Renstra OPD Mitra



Gambar 4. 15. Verifikasi Renstra OPD Mitra

4.4. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

4.4.1. Sub Bidang Perekonomian

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
2. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Diokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3. Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
4. Rapat koordinasi progres pengelolaan pasar kutau dan berendau kutau
5. OPD Mitra Melakukan Verifikasi RKA Pergeseran 2025



Gambar 4. 16. Verifikasi RKA Pergeseran 2025 Mitra PSI

6. Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Gambar 4. 17. Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

7. Verifikasi Renstra OPD Mitra PSI



Gambar 4. 18. Verifikasi Renstra OPD Mitra PSI

4.4.2. Sub Bidang Sumber Daya Alam

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
2. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Diokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
3. Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
4. Mengadakan Rapat Perencanaan Kawasan Perdesaan, Acara Ini Dihadiri Beberapa OPD Terkait dan Beberapa Kades Yang Ada Di Bengkulu Selatan



Gambar 4. 19. Rapat Perencanaan Kawasan Perdesaan

5. Rapat Terkait Kawasan Perdesaan Food Estate Berbasis Korporasi Petani Kecamatan Kedurang Kabupten Bengkulu Selatan Tahun 2026-2030



Gambar 4. 20. Rapat Terkait Kawasan Perdesaan Food Estate

6. Survey Kawasan Prioritas Pedesaan ke Kecamatan Kedurang



Gambar 4. 21. Survey Kawasan Prioritas Pedesaan Kecamatan Kedurang

4.4.3. Sub Bidang Infrastruktur

Pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Infrastruktur adalah :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2. Pelaksanana Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Diokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

4. Bidang PSI Bekerjasama Dengan Pokja PKP dan Wahana Visi Indonesia Mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Studi EHRA di Aula Bappeda Litbang Bengkulu Selatan



Gambar 4. 22. Sosialisasi Pelaksanaan Studi EHRA

5. Rapat terkait persiapan penyusunan readiness criteria (RC) pengusulan DAK penanganan kumuh terintegrasi TA 2025
6. Zoom Verifikasi Usulan Kegiatan Inpres 2 Tahun 2025 (Bidang Irigasi)



Gambar 4. 23. Zoom Verifikasi Usulan Kegiatan Inpres 2 Tahun 2025

7. Verifikasi DPA Perubahan OPD Mitra



Gambar 4. 24. Verifikasi DPA Perubahan OPD Mitra

8. Verifikasi Renstra OPD Mitra



Gambar 4. 25. Verifikasi Renstra OPD Mitra

4.5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

4.5.1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Sosial Pemerintahan adalah :

1. Pembentukan Tim Pengumpul data IPKD
2. Penetapan SK tentang Tim Pengumpul IPKD
3. Membahas rencana pengumpulan data IPKD
4. Rapat Pembahasan Penilaian IPKD



Gambar 4. 26. Rapat IPKD

4.5.2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah :

1. Pembentukan Tim Komisi Daerah (KOMDA) Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Daya Genetik Kab. Bengkulu Selatan
2. Penetapan SK Tim KOMDA Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Daya Genetik Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Pelaksanaan dan Rapat Koordinasi Pelepasan SDG Lokal Bengkulu Selatan

4.5.3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi adalah :

1. Penyusunan dan penyelesaian Dokumen Administrasi dan Regulasi (SK Klinik Inovasi, SK Tim Juri, SK Tim Pelaksana Lomba Inovasi Daerah dan SK Agen Inovasi)
2. Pengumpulan Data dan Usulan Inovasi Perangkat Daerah.
3. Konsultasi dan Koordinasi Terkait Inovasi



Gambar 4. 27. Konsultasi dan Koordinasi Inovasi

4.5.4. Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan Kegiatan Sub Hak Kekayaan Intelektual adalah :

1. Rapat Konsultasi dan Koordinasi tentang HAKI



Gambar 4. 28. Rapat Pembahasan HAKI

BAB V CAPAIAN KERJA DAN KINERJA

5.1 Capaian Kerja

Untuk capaian Kerja, berikut di tampilkan capaian pada Kegiatan/Sub kegiatan dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan Triwulan 3 tahun anggaran 2025.

Tabel 5. 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV (KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54	54	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	2	20% efisiensi anggaran
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	11	100
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	723	723	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30.000	30.000	100

8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.600	6.600	100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265	265	100
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4	100
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	100
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52	52	100

Tabel 5. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (PERENCANAAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan perangkat daerah, dan laporan tahunan	Dokumen LAKIP, LPPD dan Laporan Tahunan	14 Laporan	14 Laporan	100
3		Meningkatkan pelaksanaan tugas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan	24 Laporan	24 Laporan	100

Tabel 5. 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN (KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	616 orang	640 Orang	104
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersusunnya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	100
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	100

Tabel 5. 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG PERENCANAAN DAN
PENDANAAN)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	3	100
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	1	100

Tabel 5. 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG DATA DAN INFORMASI)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200	200	100
2	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	1	100

Tabel 5. 6
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kota	Terlaksananya Koordinasi pencapaian target indikator makro daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	4	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Optimalisasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2	2	100
3		Penyusunan evaluasi rencana kerja dan Dak Fisik 2025	Jumlah usulan Dak Fisik dan Non Fisik	10	10	100

Tabel 5. 7
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG PPM I)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	100
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1	1	100

Tabel 5. 8

INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG PPM II)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	1	100
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	18	18	100

Tabel 5. 9

INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG PPM III)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	14	4	100
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	1	1	100

	daerah Bidang Pembangunan manusia	Manusia	pada Bidang Pembangunan Manusia			
--	-----------------------------------	---------	---------------------------------	--	--	--

Tabel 5. 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG PEREKONOMIAN)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1	1	100
2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10	10	100
3.		Meningkatkan Kompetensi di bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan profesi perencanaan pembangunan	1	1	100
4.		Meningkatkan pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Perencanaan Pembangunan	Jumlah Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Perencanaan Pembangunan	1	1	100

Tabel 5. 11
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG SUMBER DAYA ALAM)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	8	8	100
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	8	8	100
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1	1	100
4		Terlaksananya hasil verifikasi dokumen perencanaan	Jumlah laporan hasil verifikasi dokumen perencanaan	6	6	100

Tabel 5. 12
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PERENCANA (BIDANG INFRASTRUKTUR)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1	1	100
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8	8	100
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8	8	100
4		Meningkatkan Kopetensi Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah kegiatan yang Dilakukan untuk mendukung Pengembangan potensi Perencanaan Pembangunan	4	4	100
5		Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Lain yang mendukung Pelaksanaan Tugas Perencanaan Pembangunan	Jumlah kegiatan yang Dilakukan untuk mendukung Pelaksanaan tugas Perencanaan Pembangunan	4	4	100

Tabel 5. 13
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PENELITI (BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	100
			jumlah Varietas unggul lokal yang terdaftar	1	1	100
			Jumlah dokumen sumber daya genetik	1	1	100

Tabel 5. 14
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PENELITI (BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil penelitian & pengembangan pertanian, perkebunan, dan	1	1	100
		Meningkatnya kualitas dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi pembangunan	Jumlah varietas unggul lokal yang terdaftar	1	1	100
			Jumlah dokumen sumber daya genetik	1	1	100

Tabel 5. 15
INDIKATOR KINERJA UTAMA FUNGSIONAL PENELITI (BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI)

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
2	Penelitian pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	1	100
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100
3	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	1	100

5.2 Capaian Kinerja

Berikut capaian Kinerja pada Program berdasarkan Indikator Kinerja Esselon III di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan selama Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5. 16
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III (SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG)

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,00	71,50	94,08%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

Tabel 5. 17
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III (KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DAERAH)

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
A	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	25,00	0	Hasil Evaluasi Belum diterima
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	94.00	105.30	112.02%
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90.00	90.00	100%
		Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai Pengukuran Kinerja	23,00	0	Hasil Evaluasi Belum diterima
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah	59.09	54.54	92.30%

	4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Optimalisasi Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	100	100	100%
--	---	--	---	---	-----	-----	------

Tabel 5. 18
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III (KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
A	Program kordinasi dan sinkronisassi perencanaan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	51.00	50.20	98.43%
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	89.50	92.10	102.91%

Tabel 5. 19
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III (KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR)

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	51.00	50.20	98.43%

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan pada DokRen (RPJMD- RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/S ub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	87.15	92.78	106.46%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan pada DokRen (RPJMD- RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/S ub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	93.85	96.13	102.43%

Tabel 5. 20
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III (KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN)

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Tahun 2025		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan	47.25	80.00	169.31%
	Pengendalian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dikembangkan	10.00	2.00	20.00%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dikembangkan	15.00	2.00	13.33%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	10.00	2.00	2.00%
		Menigkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	1.50	14.59	972.67%
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	18.00	19.05	105.83%

5.3 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5. 21
INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON II (KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Tahun 2025		Capaian (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan			90.00	84.92	94%
			Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	85.00	77.25	91%
				Persentase Kualitas Perencanaan	87.00	86.55	99%
				Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	100	100	100%
	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Nilai Kematangan Inovasi Daerah			72.00	90.91	126%
			Meningkatnya Capaian Kapasitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	65.01	62.27	96%

BAB VI

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

6.1 Permasalahan

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 dapat dikatakan berjalan secara baik, namun dalam perjalannya tidak terlepas dari beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh.
2. Belum optimalnya analisis usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga masih terjadi ketidakselarasan sebagian output dan outcome yang dihasilkan.
3. Belum Optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kegiatan pembangunan.

6.2 Upaya Pemecahan Masalah

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, diupayakan solusi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh.
2. Mengoptimalkan usulan program dan kegiatan SKPD sehingga hasil output dan outcome menjadi selaras.
3. Mengoptimalkan hasil riset sebagai dasar pengambilan kegiatan pembangunan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Tahunan ini merupakan basis data terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan serta memuat informasi terkait lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025.

Data yang tersaji dalam laporan ini kiranya dapat menjadi informasi penting bagi semua pihak yang menginginkan gambaran secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan serta menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan khususnya pembangunan dan Pengembangan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan ini, Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik selama ini, kiranya usaha yang telah dilakukan bersama akan memberikan manfaat bagi semua.

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna telaah bagi Kami demi perbaikan kedepannya. Semoga Laporan Tahunan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Kepala BAPPEDA LITBANG
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljannah, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

LAMPIRAN

MATRIKS KONSOLIDASI

REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2025

NO	URAIAN	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Rata-rata
		RKPD	RPJMD	%	RENJA	RENSTRA	%	RKA	RENJA	%	
Bidang PPM											
1	Bappeda_Litbang	14	14	100.00	18	18	100	43	48	89.58333333	96.52777778
2	Dinas Sosial	6	6	100.00	74	79	93.67088608	45	74	60.81081081	84.8272323
3	Dinas PMD	3	3	100.00	8	8	100	44	44	100	100
4	Dinas Dikbud	8	8	100.00	23	24	95.83333333	47	83	56.62650602	84.15327979
5	Dinas Perpustakaan	4	4	100.00	15	15	100	35	47	74.46808511	91.4893617
6	Dinas Nakertrans	8	8	100.00	17	21	80.95238095	26	28	92.85714286	91.26984127
7	Badang Kesbangpol	6	6	100.00	11	11	100	23	23	100	100
8	Inspektorat	3	3	100.00	9	9	100	27	41	65.85365854	88.61788618
9	Dinas Pora	4	4	100.00	14	14	100	26	26	100	100
10	Dinas PPKB3A	8	8	100.00	21	21	100	46	47	97.87234043	99.29078014
11	Dinas Kesehatan	5	5	100.00	23	23	100	57	78	73.07692308	91.02564103
12	Sekretariat Daerah	3	3	100.00	21	21	100	57	57	100	100
13	Sekretariat DPRD	2	2	100.00	16	18	88.88888889	41	42	97.61904762	95.5026455
14	SATPOL PP & PEMADAM KEBAKARAN	3	3	100.00	15	15	100	47	60	78.33333333	92.77777778
15	Dinas Kominfo	5	5	100.00	12	12	100	25	25	100	100
16	Badan KPSDM	3	3	100.00	11	11	100	28	29	96.55172414	98.85057471
17	Dinas Dukcapil	5	5	100.00	10	15	66.66666667	26	20	130	98.88888889
18	Kecamatan Seginim	5	5	100.00	13	30	43.33333333	24	24	100	81.11111111
19	Kecamatan Pino	3	3	100.00	8	8	100	13	13	100	100
20	Kecamatan Bunga mas	3	3	100.00	10	10	100	15	21	71.42857143	90.47619048
21	Kecamatan Kedurang Ilir	5	5	100.00	12	12	100	23	23	100	100
22	Kecamatan Kedurang	5	5	100.00	14	14	100	31	31	100	100
23	Kecamatan Manna	5	5	100.00	13	14	92.85714286	19	24	79.16666667	90.67460317
24	Kecamatan Kota Manna	5	5	100.00	11	11	100	14	20	70	90
25	Kecamatan Pasar Manna	5	5	100.00	14	14	100	11	21	52.38095238	84.12698413

INSTRUMEN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub- Indikator			Ops	Penilaian	Bobot	Kondisi	Nilai	Definisi	Kelengkapan Dokumen	
1			Sinergi		32		24.72	Mengukur Kerja sama antar Pemerintahan, Yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama		
	a.		Keselarasn Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN		9		7.72	Pengukuran Kesesuaian substansi dalam dokumen RPMJMD dengan dokumen RPJMN	Mencantumkan buku / Dokumen RPJMD untuk memastikan Kesesuaian	
	1)		Keselarasn antara Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN		2		2.00	Mengukur Keselarasn antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN, dengan Menjumlahkan skor sub indikator		
	a)		Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN B. C. Di atas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN	A = 0 B= 0,3 C= 0,5	0,50	C	0.50	Mengukur tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan sasaran PN RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang
	b)		Tersedia tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B= 0,3	0,50	B	0.50	terdapat tabel yang menyandingkan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	c)		Tingkat Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah Dalam RPJMD dengan PN RPJMN	A. Tidak ada keterkaitan Kurang dari 50% sesuai dengan PN RPJMN B. C. Di atas atau sama dengan 50% sesuai dengan PN RPJMN	A=0 B=0,3 C=0,5	0,50	C	0.50	Mengukur tingkat keselarasn Prioritas Pembangunan daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN, dibuktikan dengan argumentasi dari	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan
	d)		Tersedia tabel persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	A. Tidak ada B. Ada	A = 0 B=0,5	0,50	B	0.50	terdapat tabel yang menyandingkan antara PN RPJMN dengan prioritas Pembangunan Daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	2		Tersedianya dukungan program Daerah dalam RPJMD untuk mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN		3		1.72	Mengukur Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan Prioritas dalam RPJMN, dengan menjumlahkan skor sub indikator		
	a)		Ketersedian dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan)	A. Ketersedian dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN. B. Ketersedian dukungan Program daerah dalam RPJMD lebih dari 25 % dan sama dengan atau kurang dari 50% Terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN. C. Ketersedian dukungan Program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN. D. Ketersedian dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN. E. Ketersediaan dukungan program Daerah dalam RPJMD 100% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN	A= 0,086 B = 0,172 C = 0,258 D=0,344 E=0,43	0,43	D	0.34	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 1 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

				b)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 2 Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN sesuai kewenangan daerah	<p>A. ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN.</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN.</p> <p>C. C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan Prioritas dalam PN 2 RPJMN.</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN.</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100 % terhadap kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN.</p>	<p>A=0,086 B=0,172 C=0,258 D=0,344 E=0,43</p>	0,43	B	0.17	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 2 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				c)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 3 (Peningkatan sumber daya manusia Berkualitas dan Berdaya saing) RPJMN sesuai kewenangan daerah	<p>A. ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN.</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN.</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan Prioritas dalam PN 3 RPJMN.</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN.</p> <p>E. E.Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100 % terhadap kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN.</p>	<p>A=0,086 B=0,172 C=0,258 D=0,344 E=0,43</p>	0,43	C	0.26	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 3 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				d)	Ketersediaan dukungan program daerah untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN sesuai kewenangan daerah.	<p>A. ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN.</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN.</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan Prioritas dalam PN 4 RPJMN.</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN.</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100 % terhadap kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN.</p>	<p>A=0,086 B=0,172 C=0,258 D=0,344 E=0,43</p>	0,43	B	0.17	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 4 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				e)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan pelayanan Dasar) RPJMN sesuai kewenangan daerah	<p>A. ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN.</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN.</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan Prioritas dalam PN 5 RPJMN.</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN.</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100 % terhadap kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN.</p>	<p>A=0,086 B=0,172 C=0,258 D=0,344 E=0,43</p>	0,43	C	0.26	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

B	f)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN sesuai kewenangan daerah.	<p>A. ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN.</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN.</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan Prioritas dalam PN 6 RPJMN.</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN.</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100 % terhadap kegiatan prioritas dalam PN 6 RPJMN.</p>	<p>A=0,086 B=0,172 C=0,258 D=0,344 E=0,43</p>	0,43	B	0.17	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 5 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	g)	Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sesuai kewenangan daerah	<p>A. ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD sama dengan atau kurang dari 25% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN.</p> <p>B. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN.</p> <p>C. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% terhadap kegiatan Prioritas dalam PN 7 RPJMN.</p> <p>D. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN.</p> <p>E. Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD 100 % terhadap kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN.</p>	<p>A=0,086 B=0,172 C=0,258 D=0,344 E=0,43</p>	0,43	C	0.26	Mengukur substansi dan jumlah dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN 7 RPJMN sesuai kewenangan daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	3)	Indikator makro pada RPJMD selaras dengan Indikator makro pada RPJMN :			1		1.00	Mengukur keselarasan antara indikator makro pada RPJMD dengan indikator makro pada RPJMN, dengan menjumlahkan skor sub indikator.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	a)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	<p>A. Tidak Selaras</p> <p>B. Selaras</p>	<p>Tidak</p> <p>A = 0,25 B = 0,50</p>	0,5	B	0.50	Target tingkat pengangguran terbuka pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN secara nilai, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dengan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	b)	Tingkat Kemiskinan (%)	<p>A. Tidak Selaras</p> <p>B. Selaras</p>	<p>Tidak</p> <p>A = 0,25 B = 0,50</p>	0,5	B	0.50	target tingkat Kemiskinan pada RPJMD selaras dengan indikator makro pada RPJMN secara nilai, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dengan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	4)	Dokumen RPJMD selaras dengan proyek Prioritas strategis	<p>A. Tidak</p> <p>B. Ya</p>	<p>A = 0,25 B = 1</p>	1	B	1.00	Mengakomodir seluruh indikator SPM sesuai dengan perundang-undangan pada dokumen RPJMD, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	5)	Komponen SPM di RPJMD diselaraskan dengan komponen SPM Nasional	<p>A. Tidak</p> <p>B. Ya</p>	<p>A=0,5 B=1</p>	1	B	1.00	Mengakomodir dan mendukung seluruh proyek prioritas strategis nasional dalam dokumen RPJMD, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

			6)	Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM Nasional	A. Tidak B. Ya	A=0,5 B=1	1	B	1.00	Menyesuaikan target indikator SPM sesuai target Nasional, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b.	Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP			13		7.00	Pengukuran Kesesuaian substansi dalam dokumen RKPD dengan dokumen RKP	Mencantumkan Dokumen RKPD
			1)	Keselarasan antara Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP			2,50		2.50	Mengukur Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP, dengan Menjumlahkan skor sub indikator	
			a)	Tingkat Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada keterkaitan Kurang B. dari 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP C. Di atas 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP	A=0,1 B=0,31 C=0,625	0,625	C	0.63	Indikator sasaran pembangunan daerah RKPD memiliki keterkaitan dengan sasaran PN RKP dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya tabel persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RKPD dengan PN RKP	A. Tidak Ada B. Ada	A=0 B=0,625	0,625	B	0.63	Terdapat tabel yang menyandingkan antara Sasaran Pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			c)	Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD dengan PN RKP	A. Tidak ada keterkaitan Kurang B. dari 50% Prioritas Program RKP selaras dengan PN RKP C. Di atas 50% prioritas program RKP	A=0,1 B=0,31 C=0,625	0,625	C	0.63	Mengukur tingkat keselarasan Prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD dengan PN RKP, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan
			d)	Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP dengan Prioritas pembangunan Daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A=0 B=0,625	0,625	B	0.63	Terdapat tabel yang menyandingkan antara PN RKP dengan prioritas Pembangunan Daerah, dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	
			2)	Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN 1 : Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP			1,50		0.56	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN 1, dengan menjumlahkan skor sub indikator	
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP sesuai dengan Kewenangan Daerah	A. => 25% B.C 25% - 50% .D. 50% - 75% => 75%	A=0,1875 B=0,375 C=0,5625 D=0,75	0,75	C	0.56	Terdapat dukungan secara substansi program daerah terhadap kegiatan prioritas pada Pn penguatan Ekonomi dan pertumbuhan berkualitas RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A=0 B=0,75	0,75	A	-	Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
			3)	Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN 2 : Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP.			1,50		0.38	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN 2, dengan menjumlahkan skor sub indikator.	
			a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan pemerataan wilayah RKP sesuai dengan Kewenangan Daerah	A. => 25% B.C 25% - 50% .D. 50% - 75% => 75%	A=0,1875 B=0,375 C=0,5625 D=0,75	0,75	B	0.38	Terdapat dukungan secara substansi program daerah terhadap kegiatan prioritas pada Pn penguatan Ekonomi dan pertumbuhan berkualitas RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

				b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A=0 B=0,75	0,75	A	-	Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				4)	Tersedianya dukungan program daerah RKP terhadap kegiatan prioritas pada PN 3 : Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya			1,50		0.38	Terdapat dukungan program daerah RKP terhadap kegiatan prioritas pada PN 3, dengan menjumlahkan skor sub indikator.	
				a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan Berdaya saing RKP sesuai dengan kewenangan daerah.	A. => 25% B.C 25% - 50% .D. 50% - 75% => 75%	A=0,1875 B=0,375 C=0,5625 D=0,75	0,75	B	0.38	Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%).	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A=0 B=0,75	0,75	A	-	Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				5)	Tersedianya dukungan program daerah RKP terhadap kegiatan Prioritas pada PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP			1,50		0.38	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKP terhadap kegiatan prioritas pada PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP.	
				a)	Tingkat dukungan program daerah RKP terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. => 25% B.C 25% - 50% .D. 50% - 75% => 75%	A=0,1875 B=0,375 C=0,5625 D=0,75	0,75	B	0.38	Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A=0 B=0,75	0,75	A	-	Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				6)	Tersedianya dukungan program daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5 : Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP			1,50		0.75	Mengukur Ketersediaan dukungan Program daerah RKP terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5 : Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP	
				a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur dan pelayanan dasar RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. => 25% B.C 25% - 50% .D. 50% - 75% => 75%	A=0,1875 B=0,375 C=0,5625 D=0,75	0,75	D	0.75	Terdapat dukungan dari program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan infrastruktur dan pelayanan dasar RKP sesuai dengan kewenangan daerah dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A=0 B=0,75	0,75	A	-	Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

				7)	Tersedianya dukungan program daerah RKPd terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim RKP			1,50		0.56	Mengukur ketersediaan dukungan program daerah RKPd terhadap kegiatan prioritas pada PN 6 : Lingkungan hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP.	
				a)	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP sesuai dengan kewenangan daerah	A. => 25% B.C 25% - 50% .D. 50% - 75% => 75%	A=0,1875 B=0,375 C=0,5625 D=0,75	0,75	C	0.56	Terdapat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP sesuai dengan kewenangan dalam range (0-100%), dibuktikan dengan argumentasi dari assessor dan didukung oleh dokumen yang relevan.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				b)	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A=0 B=0,75	0,75	A	-	Terdapat informasi tertulis dan eksplisit yang menyandingkan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah.	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				8)	Indikator makro pada RKPd selaras dengan Indikator makro pada RKP			1,50		1.50	Mengukur keselarasan Indikator makro RKPd terhadap indikator makro dalam RKP	
				a)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	A. => 25% B.C 25% - 50% .D. 50% - 75% => 75%	A=0,375 B= 0,75	0,75	B	0.75	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%) di RKPd selaras dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%) di RKP	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				b)	Tingkat Kemiskinan (%)	A. Tidak Ada B. Ada	A=0,375 B= 0,75	0,75	B	0.75	Tingkat Kemiskinan (%) di RKPd selaras dengan Tingkat Kemiskinan (%) di RKP	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
				C)	Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membiayai Program Prioritas Nasional/Major Project dalam dokumen RKPd			10		10.00		Mencantumkan dokumen APBD dan RKPd
				1)	Tersedianya dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPd	A. Tidak Tersedia B. Tersedia	A=10 B = 10	10	B	10.00	Mengukur Proporsi dukungan APBD untuk program Prioritas Nasional/Major Project dalam dokumen RKPd	assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan.

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub- Indikator			Opsi	Penilaian	Bobot	Kondisi	Nilai	Definisi	Kelengkapan Dokumen
2	Kualitas Perencanaan				58		50.20	Mengukur Kualitas Perencanaan dengan mempertimbangkan Kesesuaian antara Isu Strategis- Target- Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan Tingkat inovasi dalam perencanaan Pembangunan pemda	
	a)	Kesesuaian antara Isu strategis -Target- Program/Proyek di RPJMD atau RKPD			49		42.20	Mengukur Kesesuaian antara Isu strategis-Target-Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKP	Mencantumkan dokumen RPJMD dan RKPD
	1)	Kesesuaian Isu Strategis dengan kebutuhan Daerah			18		13.2	Mengukur kesesuaian Isu Strategis dengan kebutuhan daerah	
	a)	Keterkaitan permasalahan daerah (Kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi	A. Penyusunan kebutuhan daerah sama dengan atau kurang dari 25% hasil evaluasi B. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% hasil evaluasi C. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% hasil evaluasi D. Penyusunan kebutuhan daerah lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% hasil evaluasi E. Penyusunan kebutuhan daerah 100% berdasarkan hasil evaluasi	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6	6	D	4.8	mengukur keterkaitan permasalahan daerah(Kebutuhan daerah) dengan hasil evaluasi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	b)	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	A. Kesesuaian sama dengan atau kurang dari 25% B. Kesesuaian lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% C. Kesesuaian lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% D. Kesesuaian lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% E. Kesesuaian 100%	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6	6	C	3.6	Mengukur Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	c)	penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis	A. Penyusunan prioritas sama dengan atau kurang dari 25% isu strategis yang telah diidentifikasi B. Penyusunan prioritas lebih dari 25% dan sama dengan atau kurang dari 50% isu strategis yang telah diidentifikasi C. Penyusunan prioritas lebih dari 50% dan sama dengan atau kurang dari 75% isu strategis yang telah diidentifikasi	A = 1,2 B = 2,4 C = 3,6 D = 4,8 E = 6	6	D	4.8	Mengukur keterkaitan penyusunan prioritas pembangunan dengan isu strategis	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

				D. Penyusunan prioritas lebih dari 75% dan sama dengan atau kurang dari 99% isu strategis yang telah diidentifikasi E. Penyusunan 100% berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi						
		2)	Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah			14		12.00	Mengukur kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		a)	Tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	A. Tidak Ada B. Ada	A = 0 B = 6	6.00	B	6.00	Pemerintah daerah memiliki indikator sasaran untuk isu strategis/prioritas pembangunan daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		b)	Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah	A. =< 25 % B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. => 75%	A = 2 B = 4 C = 6 D = 8	8.00	C	6.00	Mengukur Tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		3)	Kesesuaian Program / Kegiatan / Proyek dalam mencapai target dan sasaran program			17		17.00	Mengukur Kesesuaian Program / Kegiatan / Proyek dalam mencapai target dan sasaran program	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		a)	Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas	A. =< 25 % B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. => 75%	A = 2,125 B = 4,25 C = 6,375 D = 8,5	8.50	D	8.50	Mengukur proporsi Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan menjadi program prioritas	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		b)	Tingkat Ketertarikan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas	A. =< 25 % B. 25% - 50% C. 50% - 75% D. => 75%	A = 2,125 B = 4,25 C = 6,375 D = 8,5	8.50	D	8.50	Mengukur tingkat Keterkaitan indikator sasaran prioritas indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		b.	Inovasi Perencanaan Pembangunan			9.00		8.00	Mengukur tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemda dalam proses Perencanaan Pembangunan	Mencantumkan Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD)
		1)	Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan	A. Lemah B. Kuat	A = 1 B = 3	3	B	3	Mengukur Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang dilaksanakan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		2)	Keterkaitan output dengan outcome inovasi	A. Lemah B. Kuat	A = 1 B = 3	3	B	3	Mengukur Keterkaitan output dengan outcome inovasi	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
		3)	Proporsi jumlah proyek inovasi di dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap perencanaan proyek reguler	A. 0% B. 0,1% - 2% C. 2% - 4,9% D. => 5%	A = 1 B = 1,5 C = 2 D = 3	3	C	2	Mengukur proporsi Jumlah Inovasi Perencanaan Pembangunan	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan

Nama Indeks, Aspek, Indikator, Sub Indikator				Opsi	Penilaian	Bobot	Kondisi	Nilai	Definisi	Keterangan Dokumen
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja					10		10	Mengukur keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja dilihat dari Target dan Sasaran Pembangunan daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	
	a.	Target dan Sasaran Pembangunan daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait				10		10	Mengukur Target dan Sasaran Pembangunan daerah yang menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	Mencantumkan Dokumen RPJMD, RKPd atau dokumen lain yang sesuai terkait
	1)	Cascading Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah				10		10	Mengukur Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah menggunakan metode Cascading	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang relevan
	a)	Tersedianya penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas	A. Tidak Ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	5	C	5	Terdapat penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang	
	b)	Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggungjawab	A. Tidak Ada B. Ada sebagian C. Tercascade seluruhnya	A = 0 B = 2 C = 5	5	C	5	Mengukur / mengetahui Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggungjawab	Assessor menuliskan pernyataan dan argumentasi dalam mendukung jawaban serta dilengkapi dengan tangkapan layar dan dokumen yang	

Komponen Penilaian IPPN Pemerintah Daerah

No	Komponen	Sub Komponen	Nilai
1	Sinergi		24.72
		Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	
		Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	
		Keselarasan anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap Pembangunan Nasional di Daerah	
2	Kualitas Perencanaan		50.20
		Kesesuaian Prioritas Daerah dengan isu	
		Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu strategis	
		Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai target dan sasaran	
		Inovasi Perencanaan Pembangunan	
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja		10.00
		Jumlah	84.92

MATRIKS CAPAIAN KINERJA KABID LITBANG

Lampiran

No	Sasaran	Indikator Program/Outcome/Hasil	Rumus Capaian Target dan Realisasi	Target
1.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase Penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan	$\frac{\sum \text{Inovasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan}}{\sum \text{Inovasi yang ditetapkan dalam 1 Tahun}} \times 100$	$\frac{19}{40} \times 100 = 47,45$ $\frac{40}{50} \times 100 = 80 \text{ (Realisasi)}$
2.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang PPPP yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bid. Pemerintahan dan Penaklilan Peraturan}} \times 100$	$\frac{0,2}{2} \times 100 = 10 \text{ (Target)}$ $\frac{0,04}{2} \times 100 = 2 \text{ (Realisasi)}$
3.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang SosDuk yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan}} \times 100$	$\frac{0,3}{2} \times 100 = 15 \text{ (Target)}$ $\frac{0,04}{2} \times 100 = 2 \text{ (Realisasi)}$
4.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	$\frac{\sum \text{Penelitian Bidang EkoBang yang dikembangkan}}{\sum \text{Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan}} \times 100$	$\frac{0,2}{2} \times 100 = 10 \text{ (Target)}$ $\frac{0,04}{2} \times 100 = 2 \text{ (Realisasi)}$

5.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	$\frac{\text{Capaian IGA tahun } n - \text{capaian IGA tahun lalu}}{\text{Capaian IGA tahun lalu}} \times 100$	$\frac{52,2 - 51,45}{51,45} \times 100 = 1,5 \text{ (Target)}$ $\frac{62,27 - 54,34}{54,34} \times 100 = 14,59 \text{ (Realisasi)}$
6.	Meningkatnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Pertumbuhan Inovasi setiap Tahun	$\frac{\text{Jumlah Inovasi tahun } n - \text{Jumlah Inovasi tahun lalu}}{\text{Jumlah Inovasi tahun lalu}} \times 100$	$\frac{40 - 34}{34} \times 100 = 18 \text{ (Target)}$ $\frac{50 - 42}{42} \times 100 = 19,05 \text{ (Realisasi)}$

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

**REALISASI ANGGARAN APBD TRIWULAN IV
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				9.632.688.500		8.912.914.360			8.534.220.516	95,75	
XX.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.837.729.700		7.034.161.560			6.685.363.734	95,04	
XX.XX.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.156.000		80.800.000			79.906.445	98,89	
XX.XX.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	38.500.000	11	38.500.000	11 Dokumen	100,00	38.084.322	98,92	
XX.XX.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	25.656.000	6	42.300.000	6 Laporan	100,00	41.822.123	98,87	Laporan tersedia : 1. Laporan Tahunan 2. LKj 3. Laporan Hasil Monev
XX.XX.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.697.496.540		5.493.091.720			5.231.243.859	95,23	
XX.XX.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	616 Orang/bulan	6.272.513.540	616	5.110.708.720	616 Orang/bulan	100,00	4.862.022.665	95,13	
XX.XX.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	412.880.000	12	370.280.000	12 Dokumen	100,00	357.280.000	96,49	
XX.XX.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	12.103.000	15	12.103.000	15 Laporan	100,00	11.941.194	98,66	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
XX.XX.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.253.000		10.253.000			10.102.281	98,53	
XX.XX.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	10.253.000	15	10.253.000	15 Laporan	100,00	10.102.281	98,53	
XX.XX.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.755.000		63.435.000			52.560.771	82,86	
XX.XX.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	8.400.000	12	21.080.000	12 dokumen	100,00	20.917.771	99,23	
XX.XX.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42.355.000	2	42.355.000	2 Orang	100,00	31.643.000	74,71	
XX.XX.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			406.475.000		515.262.000			507.425.963	98,48	
XX.XX.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	13.615.000	11	13.615.000	11 Paket	100,00	13.111.055	96,30	
XX.XX.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	51.606.000	13	60.146.000	13 Paket	100,00	56.165.250	93,38	
XX.XX.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 Paket	72.204.000	65	94.481.000	65 Paket	100,00	91.535.220	96,88	
XX.XX.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	21.000.000	10	27.000.000	10 Paket	100,00	26.694.979	98,87	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
XX.XX.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6600 Dokumen	50.000.000	6600	65.750.000	6600 Dokumen	100,00	65.650.000	99,85	
XX.XX.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	198.050.000	155	254.270.000	155 Laporan	100,00	254.269.459	100,00	
XX.XX.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86.213.000		253.136.680			250.335.995	98,89	
XX.XX.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	86.213.000	6	253.136.680	6 unit	100,00	250.335.995	98,89	
XX.XX.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.193.160		183.301.160			165.852.172	90,48	
XX.XX.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	246.193.160	12	183.301.160	12 Laporan	100,00	165.852.172	90,48	
XX.XX.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			276.188.000		434.882.000			387.936.248	89,20	
XX.XX.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	252.418.000	23	297.643.000	23 unit	100,00	253.610.248	85,21	
XX.XX.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	2 Unit	86.319.000	2 Unit	100,00	85.176.000	98,68	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
XX.XX.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	23.770.000	52	50.920.000	52 Unit	100,00	49.150.000	96,52	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			537.988.000		601.488.000			595.180.235	98,95	
05.01.02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			322.554.000		322.554.000			319.829.181	99,16	
05.01.02.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	66.000.000	1	66.000.000	1 Berita Acara	100,00	65.258.958	98,88	
05.01.02.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	256.554.000	3	256.554.000	3 Dokumen	100,00	254.570.223	99,23	
05.01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			78.000.000		94.500.000			93.279.445	98,71	
05.01.02.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200 Orang	78.000.000	200	94.500.000	200 Orang	100,00	93.279.445	98,71	
05.01.02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			96.434.000		96.434.000			95.604.342	99,14	
05.01.02.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	44.145.000	2	44.145.000	2 Laporan	100,00	43.660.085	98,90	
05.01.02.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	52.289.000	4	52.289.000	4 Laporan	100,00	51.944.257	99,34	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
05.01.02.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			41.000.000		88.000.000			86.467.267	98,26	
05.01.02.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	41.000.000	1	88.000.000	1 Dokumen	100,00	86.467.267	98,26	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			966.955.400		996.955.400			977.896.965	98,09	
05.01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			377.083.200		377.083.200			364.080.641	96,55	
05.01.03.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	72.078.000	2	72.078.000	2 Laporan	100,00	69.041.782	95,79	
05.01.03.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	42.533.000	1	42.533.000	1 Laporan	100,00	41.852.960	98,40	
05.01.03.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	46.804.000	1	46.804.000	1 Dokumen	100,00	45.975.192	98,23	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
05.01.03.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	47.152.000	8	47.152.000	8 Perangkat Daerah	100,00	46.636.032	98,91	
05.01.03.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	82.441.000	12	82.441.000	12 Perangkat Daerah	100,00	76.203.774	92,43	
05.01.03.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	86.075.200	1	86.075.200	1 Laporan	100,00	84.370.901	98,02	
05.01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			280.333.200		266.305.200			261.473.387	98,19	
05.01.03.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	59.595.000	4	16.095.000	4 Perangkat Daerah	100,00	15.927.604	98,96	
05.01.03.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	69.295.200	1	69.295.200	1 Laporan	100,00	68.487.698	98,83	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
05.01.03.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	102.451.000	2	102.451.000	2 Perangkat Daerah	100,00	101.343.548	98,92	
05.01.03.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat daerah	23.659.000	4	19.909.000	4 Perangkat daerah	100,00	19.417.815	97,53	
05.01.03.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	25.333.000	1	58.555.000	1 Laporan	100,00	56.296.722	96,14	
05.01.03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			309.539.000		353.567.000			352.342.937	99,65	
05.01.03.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Perangkat Daerah	184.908.000	1	184.908.000	1 Perangkat Daerah	100,00	184.816.045	99,95	
05.01.03.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	15.954.000	4	14.154.000	4 Perangkat Daerah	100,00	14.043.800	99,22	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
05.01.03.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	108.677.000	1	154.505.000	1 Laporan	100,00	153.483.092	99,34	
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			290.015.400		280.309.400			275.779.582	98,38	
05.05.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			59.193.000		59.193.000			57.995.006	97,98	
05.05.02.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	59.193.000	1	59.193.000	1 Laporan	100,00	57.995.006	97,98	
05.05.02.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			63.564.000		63.564.000			62.748.248	98,72	
05.05.02.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	63.564.000	1	63.564.000	1 Dokumen	100,00	62.748.248	98,72	
05.05.02.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			167.258.400		157.552.400			155.036.328	98,40	
05.05.02.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	98.338.600	1	88.632.600	1 Dokumen	100,00	88.270.828	99,59	
05.05.02.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	68.919.800	1	68.919.800	1 Laporan	100,00	66.765.500	96,87	

DOKUMEN EVALUASI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)**

Jl. Affan Bachsin Telp./Fax (0739) 21475 Manna 38515

Website: bappeda.bengkuluselatankab.go.id email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id

Manna, 31 Desember 2025

Nomor : 000.7/ 526 /B1/BAPPEDA-LITBANG/I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.

1. Seluruh Pejabat Eselon III
2. Seluruh Pejabat Eselon IV
3. Seluruh Pejabat Fungsional
4. Seluruh Staf ASN dan PHL

Di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
di -

Tempat

Dalam rangka Evaluasi Kinerja Triwulan Ke-4 di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dengan ini diminta kepada seluruh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional seluruh Staf ASN dan PHL di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 05 Januari 2026
Pukul : 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Aula Bappeda Litbang
Acara : Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan 4 di lingkungan Bappeda-Litbang

Demikian disampaikan, atas kehadirannya terima kasih.



Fikri Alhamdy, STP., M.M.
NIP. 198210012001121002

NOTULEN RAPAT KERJA DAN KINERJA TRIWULAN 4 BAPPEDA LITBANG TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Senin, 05 Januari 2026
Waktu : 09.30 Wib
Tempat : Ruang Aula Bappeda Litbang
Pimpinan Rapat : Kepala Bappeda Litbang
Peserta Rapat : Seluruh Pejabat Eselon III, IV, Fungsional, ASN dan PHL
Materi Rapat : Membahas Kerja dan Kinerja Triwulan ke-4 Bappeda Litbang Kab. Bengkulu Selatan

Pada hari Senin Tanggal, 05 Januari 2026 telah dilaksanakan rapat pembahasan Evaluasi Kerja dan Kinerja Triwulan ke-4 di Aula Bappeda Litbang, dengan hasil sebagai berikut :

Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

1. Bidang P2EPD :

- Penerbitan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.
- Input Laporan Triwulan 4
- Melaksanakan Musrenbang Kecamatan
- E-SAKIP tetap digunakan dalam penyusunan PK Perangkat Daerah dan untuk kedepan E-SAKIP akan dilakukan pengembangan secara bertahap.

2. Bidang PSI :

- Penerbitan ijin pembangunan Intake Batu BALAI ke PKHL Lampung.
- Verifikasi RKA dan DPA Tahun 2026.

3. Bidang PPM :

- Verifikasi RKA dan DPA Tahun 2026.

4. Bidang Litbang :

- Meningkatkan Inovasi Daerah

5. Sekretariat :

- Menyusun Laporan Evluaasi kerja dan Kinerja Triwulan ke4
- Menyusun Renstra OPD Tahun 2025-2029
- Menyusun Laporan Kerja dan Kinerja Triwulan ke-4
- Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026
- Menyusun Lkj Tahun 2025
- Menyusun Laporan Tahunan Tahun 2025
- Menyusun Rencana Aksi Tahun 2026



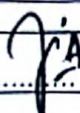

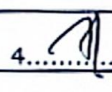
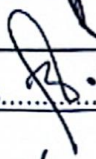

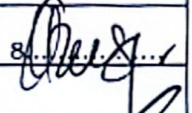


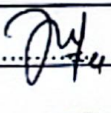

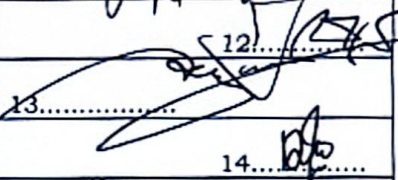
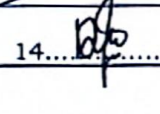


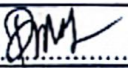



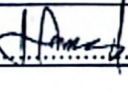
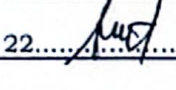

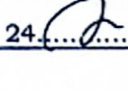


Manna, 05 Januari 2026

Notulis

Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

ABSENSI
RAPAT EVALUASI KINERJA TRIWULAN KE-4
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

HARI/TANGGAL : SENIN, 05 JANUARI 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FIKRI al Jauhary	Kepala	1. 
2	ZUMELDA SARI	PA Sekretaris	2.
3	DWI PRATI D.	Kabid PSI	3. 
4	NUSARITA Sari S.	Kurup PZEPD	4. 
5	BUDI SYAHPUTRA	Kabid Litbang	5. 
6	Yeni	Kabid - PPM	6.
7	II Sumantra	DPF	7. 
8	ATARI	KASUBANG UMPEG	8. 
9	Erell Azman	Perencana Ahli Muda	9. 
10	HAMZAH MANSUR	POKNC. A. M	10. 
11	DESTI PUSVA HANITA		11. 
12	A. Masnur	perencana ahli. muda	12. 
13	ADILAWAN UR	JPP	13. 
14	DETI HARYANI		14. 
15	Merry Septi N		15. 
16	Maryuliana		16. 
17	REZA dan Sari		17. 
18	Lumi Mardiana		18. 
19	Trisna Faleri		19. 
20	Desmi Herlin		20. 
21	Vivit Grantan		21. 
22	Pinti Istanti		22. 
23	Eti Nurhayati		23. 
24	Enni		24. 
25	Yessy Puspita Sari		25. 
26	Mela ernusari		26. 

27	Dusmi Hordena		27... <i>PS</i>
28	Elvi Idiansari		28... <i>Elvi</i>
29	Hedini Tri S.	staf litbang	29... <i>Hedini</i>
30	Puti Emban Sari 2	staf litbang	30... <i>Puti</i>
31	FETRI YENI WIDIASARI	staf litbang	31... <i>Fetri</i>
32	Suratin Fitriani	staf litbang	32... <i>Suratin</i>
33	Amelia Damayanti		33... <i>Amelia</i>
34	Nur Baiti		34... <i>Nur</i>
35	DEDI SUKANTO	PA	35... <i>DEDI</i>
36	Mohd. Herdiansyah	PPM	36... <i>Mohd.</i>
37	ANANDA		37... <i>ANANDA</i>
38	Devin Ferly Yandi		38... <i>Devin</i>
39	Kemas Muhammad Sholih		39... <i>Kemas</i>
40	ONFI Alexander	staf sekretariat	40... <i>ONFI</i>
41	OPENDRI	PHL	41... <i>OPENDRI</i>
42	M. WAHYU	PHL	42... <i>M. WAHYU</i>
43	Simon Hadi' Purnate	PHL	43... <i>Simon</i>
44	Fachran Al. U.	PHL	44... <i>Fachran</i>
45	M. MO Yanson	PHL	45... <i>M. MO</i>
46	fachral Januar	PHL	46... <i>fachral</i>
47	Hari Gusanda	Perencana Ahli Pertama	47... <i>Hari</i>
48	Mochtar, Machrus	PHL	48... <i>Mochtar</i>
49	Candra	staf	49... <i>Candra</i>
50	Alio fira maula	PPM	50... <i>Alio</i>
51	Rexi		51... <i>Rexi</i>
52	Mhammad Rebo	Analisis	52... <i>Mhammad</i>
53	Jeri Junardi	staf	53... <i>Jeri</i>
54			54.....
55			55.....

56			56.....
57			57.....
58			58.....
59			59.....
60			60.....
61			61.....
62			62.....
63			63.....
64			64.....
65			65.....
66			66.....
67			67.....
68			68.....
69			69.....
70			70.....

KEPALA RAPKOR LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Fikri Aljauhari, S.SIP, M.M.
NIP. 19821001300121002

Dokumentasi Rapat Evaluasi Kerja dan Kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Triwulan ke-4, Senin, 05 Januari 2026 di Aula Bappeda-Litbang



